

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN DESA
DI NEGERI MORELLA KECAMATAN LEIHITU
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

***PUBLIC PERCEPTION OF VILLAGE FOREST MANAGEMENT IN MORELLA
COUNTRY, LEIHITU DISTRICT, CENTRAL MALUKU REGENCY***

Iskar Iskar^{1*}, Thomas Melianus Silaya², Siti Murijuliman Rumra³

^{1,2,3} Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Pattimura Ambon
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233

*Email Korespondensi: iskar72@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan Desa di Negeri Morella. Metode penelitiannya yaitu kualitatif deskriptif. Penentuan sampel menggunakan *metode purposive sampling* yang hanya difokuskan pada masyarakat yang terlibat langsung pada pengelolaan Hutan Desa (HD) dengan jumlah responden sebanyak 31 orang serta beberapa tokoh sebagai informan kunci. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi literatur. Analisa data menggunakan statistik deskriptif dengan skala likert sebagai skala pengukuran yaitu sangat setuju (3), setuju (2), tidak setuju (1) dengan pengkategorian tinggi, sedang, rendah untuk masing-masing nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan desa Negeri Morella tergolong dalam kategori ‘*Sedang*’, meliputi persepsi terhadap pengelolaan hutan desa pra-perizinan yaitu sosialisasi dan fasilitasi, terbentuknya Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), verifikasi teknis dan terbitnya izin dan pasca perizinan yaitu perencanaan Hutan Desa (HD) dan pelaksanaan.

Kata Kunci: Persepsi, Masyarakat, Hutan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the community perceptions of village forest management in Morella Country. The research method is descriptive qualitative. The sample was determined using a purposive sampling method which only focused on communities directly involved in Village Forest (HD) management with a total of 31 respondents and several figures as key informants. Data collection methods were carried out by means of observation, interviews and literature study. Data analysis used descriptive statistics with a Likert scale as the measurement scale, namely strongly agree (3), agree (2), disagree (1) with high, medium and low categorization for each value. The research results show that the community's perception of village forest management in Morella Country is classified in the 'Medium' category, including perceptions of pre-licensing village forest management, namely socialization and facilitation, formation of LPHD, technical verification and issuance of permits and post-licensing, namely HD planning and implementation..

Keywords: Perception, Community, Village Forest

PENDAHULUAN

Hutan sebagai sumber daya alam merupakan bagian integral dan erat kaitannya dengan kehidupan karena memberikan manfaat bagi keberlangsungan masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Sejak dahulu kala hubungan interaksi antar masyarakat dan hutan telah terbangun dan tidak dapat dipisahkan. Untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat hutan harus dikelola dengan baik. Kemudian dalam pengelolaan yang baik perlu memperhatikan berbagai aspek

kelestarian, seperti : aspek ekonomi, sosial, dan budaya. (Birgantoro & Nurrochmat, 2007; Damayatanti, 2011)

Selain itu, hutan bagi masyarakat bukanlah hal yang baru melainkan salah satu sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan pokok karena hutan menyediakan pangan, papan, obat-obatan, dan sebagai sumber pendapatan keluarga. Sehingga pemerintah mengupayakan pengelolaan hutan secara lestari agar hasil hutan tetap dapat dirasakan manfaatnya pada masa mendatang.

Berdasarkan PP 23 Tahun 2021 pasal 1 ayat 23 menerangkan bahwa pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu, memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan perhutanan sosial dimana dalam Pasal 203 disebutkan bahwa Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan Kapasitas kepada Masyarakat.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan Desa merupakan salah satu dari 5 skema Perhutanan Sosial yang di kembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan masyarakat untuk menekan laju deforestasi. Kebijakan pengelolaan yang berbasis masyarakat ini bertujuan untuk mengakomodasi kearifan lokal dalam pelestarian hutan dan memberikan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu Hutan Desa juga berperan dalam memperkuat hak kelola rakyat dan mengurangi konflik kehutanan serta tantangan dalam pelaksanaannya.

Perhutanan Sosial telah banyak dilakukan di Provinsi Maluku, yang sudah diupayakan diberbagai kabupaten/kota, baik yang telah mendapatkan ijin pengelolaan maupun yang masih dalam proses permohonan ijin, baik bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.

Sehubungan dengan proses perijinan tersebut, maka salah satu bentuk Perhutanan Sosial yang telah mendapatkan ijin pengelolaan adalah Hutan Desa di Negeri Morella Kecamatan Leihitu,

Kabupaten Maluku Tengah yang ditetapkan berdasarkan SK. 8290/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018. Pengelolaan Hutan Desa Negeri Morela dilakukan oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan Keputusan Kepala Balai Perhutanan Sosial Maluku Papua No. 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku.

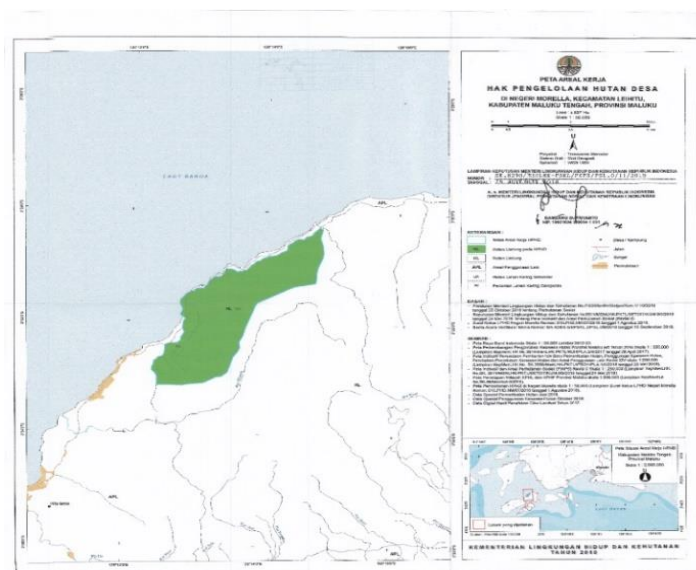
Perhutanan Sosial di Negeri Morela dalam skema Hutan Desa, baru mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan, telah memasuki kurun waktu 3 tahun lebih pasca ijin, sedangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Pada Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) sendiri baru berjalan kurang lebih 2 tahun. LPHD telah melakukan berbagai program kegiatan, yang difasilitasi oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku Papua. Sehingga masyarakat dan lembaga pengelola HD telah merasakan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Persepsi masyarakat penting untuk diteliti karena dengan mengetahui tingkat persepsi masyarakat dapat menilai bagaimana pengetahuan, penilaian, serta pemanfaatan dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat dan mengetahui serta menilai Hutan Desa memberikan pengaruh tersebut, maka penelitian ini dilakukan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November tahun 2022 hingga selesai di Negeri Morella, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Metode Penentuan Sampel

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposve sampling*, dimana responden sudah diketahui sebelumnya yaitu masyarakat Morella yang terlibat langsung pada pengelolaan Hutan Desa (HD). Jumlah responden yang diambil sebesar 31 orang terdiri dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), serta Informan kunci terdiri dari perangkat Negeri 1 orang, Tokoh masyarakat/adat 2 orang, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 1 orang, dan PSKL 1 orang.

Jenis Data

Jenis Data dalam, penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dilapangan dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya, kantor desa seperti data sosial, ekonomi, penduduk, keadaan umum lokasi dan potensi hutan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan (Kuisisioner).
- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Objek yang diteliti adalah masyarakat yang terlibat dalam Lembaga Pengelola Hutan Desa di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.
- c. Studi literatur teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian.

Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Soehartono (1995) dalam Khaeruddin (2018) menyatakan penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai fakta-fakta, sifat-sifat secara objektif di lapangan.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara dengan kuisisioner , kemudian dideskripsikan dengan menghitung persentase jawaban yang diberikan oleh responden.

Skala Pengukuran

Penggunaan skala likert ini akan ditentukan skor pada pengukuran skala likert yaitu pemberian skor tertinggi dan terendah dari masing masing jawaban pertanyaan yang diajukan kepada responden. Penelitian ini menggunakan skala likert modifikasi untuk menghilangkan kelemahan yang ada pada skala tingkat 5 (Hadi, 1991). Penentuan skor yaitu skor tertinggi jawaban pertanyaan akan diajukan kepada masyarakat adalah sebesar 3, sedangkan untuk skor jawaban terendahnya adalah 1. Sedangkan jawaban diantara kedua skala tersebut disesuaikan dengan jumlah jawaban yang ada. Untuk skala pertanyaan, yang menjawab sangat setuju diberi nilai 3, baik diberi nilai 2 dan yang memberi jawaban tidak setuju diberi nilai 1. Untuk mendapatkan pemeringkatan presepsi masyarakat, total nilai maksimal 93 dan minimum adalah 31. Selanjutnya nilai setiap dijumlahkan dan dibuat peringkatan .

Kemudian interval kelas ditentukan dengan menggunakan rumus Suparman (1990) dalam Ereh (2022) sebagai berikut :

$$C = \frac{X_n - X_l}{K}$$

Dimana :

- C : Interval Kelas
- X_n : Skor maksimum
- X_l : Skor minimum
- K : Jumlah kelas

Rumus untuk mendapatkan nilai persentase sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \text{nilai keseluruhan/jumlah kuisioner} * 100$$

Tabel 1. Panjang interval kelas masing-masing tingkat persepsi

No	Bobot skor	Interval kelas (%)	Kategori
1	31-52	<56	Rendah
2	53-73	≤78	Sedang
3	74-93	>80	Tinggi

Berdasarkan hasil perhitungan bobot skor dan interval kelas yang telah dijabarkan dalam Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa kriteria skor tertinggi dengan persentase lebih dari 80%. Kategori sedang dengan persentase kurang dari atau sama dengan 78%. Dan kategori rendah dengan persentasi kurang dari 56%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dilihat dari jenis kelamin, usia, Pendidikan, pekerjaan dan status para anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menjadi responden dalam penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa di Negeri Morella.

Kelas Umur

Usia responden berkaitan dengan mudahnya responden tersebut dalam menerima informasi dan mengolah informasi yang diterima serta menyampaikan pendapatnya. Berikut distribusi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

No	Kelas Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	58 – 64	6	19
2	50 – 57	11	35
3	42 - 49	14	45
	Jumlah	31	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa usia responden pada selang umur 42 - 49 memiliki nilai prosentase tertinggi yaitu 45% dengan jumlah 14 orang, sedangkan prosentase terendah yaitu 19% terdapat pada selang umur 58-64 dengan jumlah 6 orang. Untuk selang umur 50-57 tahun nilai persentasenya 35% dengan jumlah 11 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden berdasarkan umur memiliki tingkat kecerdasan emosi yang cukup baik dalam pengambilan keputusan pada usia produktif dalam bekerja serta memiliki tingkat keseriusan yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan pada umur 18 termasuk pada usia dewasa. Secara teori menyatakan bahwa umur dewasa akan menyebabkan seseorang memiliki kemampuan untuk mengenali emosinya dengan lebih baik sehingga kecerdasan emosinya berarti juga baik. (Triwik, 2017).

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan setiap responden tentunya memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dimana latar belakang pendidikan seseorang berpengaruh pada pemahaman terhadap pengetahuan. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	D3	1	3
2	SMA	22	71
3	SMP	3	10
4	SD	5	16
Jumlah		31	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 31 responden, tingkat Pendidikan dengan nilai prosentase tertinggi sebesar 71% adalah jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah 22 orang, kemudian tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah 16%, sebanyak 5 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 10%, sebanyak 3 orang dan Diploma (D3) adalah 3% masing-masing nilai persentasenya , , dan dengan jumlah responden pada tingkat pendidikan sebanyak 1 orang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini tentunya memiliki jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin secara umum dapat memberikan perbedaan perilaku seseorang. Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada table 4 berikut ;

Tabel 4. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	L	29	94
2	P	2	6
Total		31	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat di jelaskan bahwa responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih dominan dengan nilai persentase sebesar 94%, sebanyak 29 orang sedangkan responden dengan jenis kelamin perempuan senilai 6% sebanyak 2 orang.

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan adalah profesi yang digeluti responden dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jenis pekerjaan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut :

Tabel 5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	27	87
2	Wiraswasta	2	6
3	Staf desa	1	3
4	TNI	1	3
Total		31	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5, dapat dijelaskan bahwa sebaran pekerjaan responden dengan prosentase tertinggi yaitu petani dengan jumlah 27 orang (87%). Sedangkan prosentase terendah yaitu staf desa dan TNI sebesar masing-masing 3%, sebanyak 1 orang.

Persepsi Responden Terhadap Pengelolaan Hutan Desa di Negeri Morella

Keberadaan hutan erat hubungannya dengan masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam mewujudkan kelestarian hutan dan tidak menganggap bahwa hal ini adalah tanggung jawab pemerintah. Masyarakat sekitar hutan di negeri Morella terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa melalui Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) lewat KUPS yang dibentuk setelah terbitnya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Oleh karena itu persepsi masyarakat terhadap keberadaan Perhutanan Sosial (PS) dengan Skema Hutan Desa (HD) dimulai dari kegiatan Pra Perijinan sampai Pasca Perijinan.

Persepsi Responden Terhadap Hutan Desa Pra-perizinan

Pra-perizinan merupakan kegiatan awal dalam pengelolaan Hutan Desa. Sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan hutan harus melewati beberapa tahapan pra perizinan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan perizinan Hak Pengelolaan Hutan Desa. Selanjutnya Tabel 6 menyajikan data persepsi Responden terhadap keberadaan Hutan Desa di negeri Morella Pra-Perizinan sebagai berikut :

Tabel 6. Persepsi Responden Terhadap Hutan Desa Pra-Perizinan

No	Persepsi Masyarakat	Total skor	Persentase (%)	Kategori
1	Sosialisasi dan fasilitasi oleh BPSKL	68	73	Sedang
2	Terbentuknya LPHD	73	78	Sedang

No	Persepsi Masyarakat	Total skor	Persentase (%)	Kategori
3	Verifikasi teknis	76	82	Tinggi
4	Terbitnya izin	78	84	Tinggi
Rata-rata			79,25	Tinggi

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 6, dapat dijelaskan bahwa hasil analisis data persepsi responden terhadap verifikasi teknis dan terbitnya izin memiliki total skor dan persentase dengan katagori **Tinggi** yaitu 82% (skor 76) dan 84% (skor 78) dan skor terendah adalah sosialisasi dan fasilitasi oleh BPSKL adalah 68 (73%) yang dikategorikan **Sedang**. Pada tahapan awal pra-perizinan BPSKL melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi awal terhadap masyarakat tentang adanya program pengelolaan hutan lestari yang berbasis masyarakat. Sehingga masyarakat memahami bahwa dengan adanya program ini masyarakat dapat mengajukan perizinan agar dapat mengakses hutan secara legal. Setelah memberikan informasi awal, selanjutnya BPSKL memfasilitasi masyarakat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi dalam mengajukan pra perizinan.

Kemudian persepsi responden terhadap terbentuknya Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dengan prosentase 78% dengan skor 73 masuk dalam katagori persepsi **Sedang**. Pembentukan LPHD bertujuan untuk memberikan wewenang masyarakat dalam segala kegiatan pengelolaan hutan desa. Dalam pembentukan melibatkan berbagai pihak, antara lain pemerintah desa, tokos adat, tokoh masyarakat, BABINSA, tokoh pemuda dan perempuan berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa dan keputusan kepala desa tentang susunan pengurus LPHD. Dengan adanya LPHD pengelolaan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Selanjutnya persepsi responden terhadap tahapan verifikasi di kategorikan **Tinggi** dengan nilai prosentase 82% dengan skor 76, dengan tingkat persepsi **Tinggi** dapat dikatakan sebagian besar responden sangat setuju bahwa verifikasi dilakukan dengan baik. Verifikasi terbagi menjadi verifikasi teknis yaitu verifikasi lapangan untuk memastikan keberadaan dan kelayakan kawasan hutan yang dimohonkan dan verifikasi administratif terhadap kelengkapan dokumen permohonan pra-perizinan. Hasil verifikasi kemudian di analisis dan di evaluasi untuk menentukan kelayakan permohonan izin Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa

Untuk persepsi responden terhadap terbitnya izin Hak Pengelolaan Hutan Desa setelah melalui tahap verifikasi dan memenuhi syarat kelayakan perizinan memiliki skor tertinggi dengan

skor 78 (84%) katagori **Tinggi** untuk Izin pengelolaan diterima melalui pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 8290/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 tanggal 29 bulan November tahun 2018 pada LPHD Negeri Morella seluas \pm 927 (sembilan ratus dua puluh tujuh) Hektare pada kawasan Hutan Lindung (HD) di Negeri Morella, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dengan terbitnya izin pengelolaan Hutan Desa ini, maka kegiatan pengelolaan hutan dapat dimulai dengan mematuhi aturan yang berlaku dalam pengelolaan hutan.

Nilai rata-rata prosentase persepsi responden terhadap Hutan Desa pada kegiatan pra perizinan di negeri Morella berdasarkan tabel 5.4 adalah 79,25 yang di kategorikan tinggi.

Persepsi Responden Terhadap Hutan Desa Pasca Perizinan

Persepsi responden terhadap perencanaan Hutan Desa

Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam pengelolaan hutan . Soerenggadjiwa (1991) mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu upaya dalam bentuk rencana, dasar acuan, dan pegangan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pengusahaan hutan yang bertolak dari kenyataan saat ini dan memperhitungkan pengaruh masalah dan kendala yang memungkinkan terjadi selama proses mencapai tujuan tersebut.

Hutan Desa harus dikelola dengan baik agar terhindar dari deforestasi dan degradasi sehingga perencanaan yang baik bertujuan agar pengelolaan hutan dapat terarah dalam mencapai tujuan pengelolaan tersebut. Perencanaan Hutan Desa meliputi konservasi, rencana pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan kayu/bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan kelembagaan. Untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap tahap perencanaan maka disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Persepsi Masyarakat Terhadap Perencanaan Hutan Desa

No	Persepsi masyarakat	Total skor	Persentase (%)	Katagori
1	LPHD mengakomodir seluruh pengelolaan HD	73	78	Sedang
2	Perencanaan pengelolaan HD Oleh KUPS	80	86	Tinggi
3	Perencanaan areal kerja	69	75	Sedang
4	pembukaan wilayah hutan	63	68	Sedang

No	Persepsi masyarakat	Total skor	Persentase (%)	Kategori
5	Pengembangan kelembagaan	65	70	Sedang
Rata-rata			75,4	Sedang

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa persepsi responden terhadap LPDH mengakomodir seluruh pengelolaan Hutan Desa tergolong dalam kategori *Sedang* dengan nilai prosentase 78% dengan skor 73. Pelaksanaan kegiatan Hutan Desa untuk mengelola Hutan Desa lewat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang berkorelasi dengan KUPS. Qurniati et al. (2017) menjelaskan LPHD merupakan media untuk masyarakat menjalankan sistem pengelolaan hutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian hutan yang dikelola sebagai tanggung jawab utama termasuk memperkuat kelembagaan.

Keberadaan LPHD dinilai penting bagi masyarakat dalam rangka menjaga kestabilan fungsi hutan yang dikelola dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan hutan. Agar bisa mencapai tujuan pengelolaan, LPHD Negeri Morella bertugas mengidentifikasi setiap masalah dan melaporkan kepada pendamping/fasilitator. LPHD juga bertugas merencanakan dan mengembangkan program kerja, memantau pelaksanaannya dan melakukan evaluasi. Usaha silvopastur, dan pengolahan HHBK berupa sagu dan cengkeh menjadi indikator kinerja LPHD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LPHD negeri Morella tergolong belum efektif dikarenakan kegiatan usaha tidak berjalan secara terus menerus akibat masalah kerusakan alat ekonomi yang belum di tangani. Oleh karena itu diperlukan kajian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja LPHD

Kemudian persepsi responden terhadap perencanaan pengelolaan Hutan Desa Oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) berdasarkan Tabel 7 tergolong dalam kategori *Tinggi* karena nilai prosentase sebesar 86% dengan skor 80. Setelah adanya LPHD, selanjutnya dibentuk KUPS sebagai wadah membangun ekonomi alternatif dengan mengembangkan usaha perhutanan sosial. Untuk itu, KUPS menyusun rencana pengelolaan yang akan dilakukan. KUPS Tomasiwa dan Siliwangi melakukan perencanaan untuk kegiatan kelompok pengolahan minyak cengkeh, rencana usulan kegiatan kelompok silvopasture, dan rencana usulan kegiatan kelompok pengolahan sagu. Dengan adanya rencana model bisnis sangat membantu dalam pengelolaan Hutan Desa agar kelestarian hutan tetap terjaga.

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa persepsi responden terhadap perencanaan areal kerja termasuk dalam kategori persepsi *sedang* dengan nilai persentase 75% dengan skor 69.

Masyarakat setuju bahwa perencanaan areal kerja oleh KUPS sangat mempermudah dalam pengelolaan Hutan Desa di negeri Morella Berdasarkan SK. 8290/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/11/2018 Negeri Morella luas areal Hutan Desa Negeri Morella adalah ± 927 Ha. Perencanaan areal kerja pada HPHD negeri Morella yaitu :

1. Pengamanan dan penandaan batas pada seluruh lokasi hutan
2. Penanaman jenis damar, kenari, durian, pala, dan cengkeh seluas ± 5 hektare
3. Penanaman tanaman apotik hidup (jahe, serai, kunyit) seluas $\pm 0,5$ hektare

Selanjutnya persepsi responden terhadap pembukaan wilayah hutan diketahui nilai persentase sebesar 68% dengan skor 63 tergolong dalam kategori persepsi *sedang*. Dimana sebagian besar responden menjawab setuju bahwa kegiatan pembukaan wilayah hutan sebelum melakukan penanaman sangat membantu agar bibit yang di tanam dengan baik. Adapun jenis yang di tanam pada lahan hutan seluas ± 5 hektare damar, kenari, durian, pala dan cengkeh.

Sedangkan persepsi responden terhadap pengembangan kelembagaan berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam Tabel 7 memiliki persentase senilai 70% dengan skor 65 yang tergolong dalam kategori persepsi *sedang*, dimana sebagian besar responden menjawab setuju dengan perencanaan pengembangan kelembagaan dapat memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan.

Nilai rata—rata persepsi responden terhadap perencanaan Hutan Desa berdasarkan Tabel 7 tergolong dalam kategori *Sedang* dengan nilai prosentase 75,4%, masyarakat memahami bahwa tahap perencanaan dalam sebuah pengelolaan sangat penting agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan tujuan pengelolaan dapat tercapai.

Persepsi responden terhadap perencanaan Hutan Desa

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan penting untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan perencanaan kerja yang telah disusun agar capaian kegiatan tepat sasaran. Untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Hutan Desa, dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 8. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Hutan Desa

No	Persepsi masyarakat	Total skor	Persentase (%)	Katagori
1	Pengamanan dan perlindungan hutan	69	74	sedang
2	Pemanenan dan pengolahan	63	68	Sedang
3	Pemanfaatan jasa lingkungan	65	70	Sedang

4	Penguatan sekolah lapang HD bermanfaat bagi seluruh anggota KUPS	31	33	Rendah
5		56	60	Sedang
Rata-rata			60,2	Sedang

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis data yang disajikan pada Tabel 8 menunjukkan persepsi responden terhadap pelaksanaan kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan dengan nilai prosentase 74% dengan skor 69 termasuk dalam kategori *sedang*. Dalam rangka pengamanan dan perlindungan hutan ini berdasarkan hasil wawancara masyarakat kegiatan yang dilakukan berupa patroli pengamanan hutan dari pencurian kayu dan penebangan liar. Hal ini sangat membantu dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang terkandung dalam kawasan Hutan Desa. Selain itu kegiatan perlindungan sumber mata air juga membuat ketersediaan air tetap terjaga saat musim kemarau. Pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi yaitu penandaan batas, pengayaan tanaman, penanaman jenis pohon (damar, kenari, durian, pala, dan cengkeh) seluas ± 5 hektare, penanaman tanaman apotik hidup (jahe, serai, kunyit) seluas $\pm 0,5$ hektare.

Kemudian persepsi masyarakat terhadap pemanenan dan pengolahan memiliki nilai prosentase mencapai 68% dengan skor 63, nilai ini tergolong dalam kategori *sedang*. Berdasarkan hasil wawancara untuk kegiatan pemanenan pengolahan sagu tidak berjalan terus-menerus karena tergantung pada ketersediaan pohon yang siap di panen. Sedangkan pemanenan cengkeh dilakukan sesuai musim, untuk pengolahan minyak cengkeh masih terkendala mesin yang rusak dan belum adanya bangunan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan.

Persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan jasa lingkungan tergolong dalam kategori persepsi *sedang* dengan prosentase senilai 70% dengan skor 65. Responden masyarakat pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengembangan ekowisata Benteng Kapahaha Negeri Morella , jasa tata air berupa konservasi daerah hulu dan hilir sungai untuk menjaga dan mempertahankan kualitas air sehingga masyarakat tidak kehilangan sumber air bersih untuk konsumsi sehari-hari, kemudian jasa hutan untuk penyimpanan serta penyimpanan dan penyerapan karbon yang membantu mengurangi polusi udara.

Sedangkan untuk persepsi penguatan kelembagaan melalui pelaksanaan kegiatan sekolah lapang menunjukkan tingkat persepsi dalam kategori *rendah* dengan nilai persentase 33% dengan skor 31. Hal ini di karenakan kurangnya kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan kelembagaan.

Persepsi responden terhadap manfaat program perhutanan sosial skema Hutan Desa yang dirasakan oleh seluruh anggota KUPS termasuk dalam kategori *sedang* dengan nilai persentase 60% dengan skor 56. Dengan adanya program perhutanan sosial skema hutan desa manfaat yang dirasakan responden yaitu pengelolaan hutan yang lebih terencana dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan tujuan pengelolaan. Bantuan alat ekonomi kreatif berupa mesin pengolahan sagu, dan mesin pengolahan cengkeh sangat membantu dalam mengembangkan usaha. Selain itu juga pemberian Bantuan Pengembangan Perhutanan Sosial (Bang PeSoNa) berupa dana hibah untuk meningkatkan usaha.

Manfaatnya terhadap lingkungan dirasakan yaitu kelestarian hutan yang tetap terjaga dan manfaat sosialnya adalah keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Sedangkan dari segi ekonomi dari usaha silvopastur, pengolahan sagu dan cengkeh belum memberikan dampak signifikan karena proses produksi yang belum maksimal karena tidak dilakukan secara terus menerus serta. Sehingga masyarakat tidak menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencaharian utama.

Rata-rata prosentase persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan Hutan Desa yang ditunjukkan pada tabel 8 adalah senilai 60,2% tergolong dalam kategori persepsi *sedang*. Artinya rata-rata responden memberikan jawaban “setuju” terhadap pelaksanaan kegiatan hutan desa yang dilakukan untuk merealisasikan rencana kerja yang telah disusun dalam mencapai tujuan pengelolaan.

Dalam tahapan pengelolaan hutan selanjutnya tahap pemantauan yang dilakukan oleh Pendamping Perhutanan Sosial (PS), Dinas Kehutanan dan KLHK. Pemantauan ini berupa monitoring dan evaluasi. Untuk mendukung hal tersebut KLHK telah menyediakan aplikasi GoKUPS yang merupakan sistem informasi Perhutanan Sosial berbasis elektronik. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem pendaftaran nasional untuk perhutanan sosial dan menyediakan layanan evaluasi, pelaporan, data, dan informasi. Dalam prosesnya, pendamping PS yang bertugas melakukan pelaporan capaian program kegiatan pada aplikasi GoKUPS sehingga Dinas Kehutanan dan KLHK melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan data yang di input pada GoKUPS. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan dan capaian program berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun pemegang izin dari penyelenggaraan hutan desa, serta mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengelolaan sehingga dapat dilakukan evaluasi namun Pendamping Perhutanan Sosial pada Hutan Desa di Negeri Morella sebelumnya belum melakukan pelaporan pada GoKUPS hingga masa kerja selesai dan belum adanya pendamping PS yang baru. Hal ini membuat proses evaluasi belum dilakukan.

Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa Di Negeri Morella

Tabel 9. Rekapitulasi Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Desa

No	Persepsi masyarakat	Persentase (%)	Katagori
1	Persepsi responden terhadap hutan desa pra-perizinan	79,25	Sedang
2	Persepsi responden terhadap perencanaan hutan desa pasca perizinan	75,4	Sedang
3	Persepsi responden terhadap pelaksanaan hutan desa pasca perizinan	60,2	Sedang
Rata-rata		71,55	Sedang

Sumber : Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 9. diketahui bahwa rata-rata nilai persentase persepsi responden terhadap pengelolaan hutan desa adalah 71,55% yang di kategorikan *Sedang*. Nilai persentase tertinggi terdapat pada persepsi responden terhadap Hutan Desa pra-perizinan dengan nilai persentase 79.25%. dan yang terendah persepsi responden terhadap pelaksanaan hutan desa pasca perizinan sebesar 60,2%, selanjutnya persepsi terhadap perencanaan sebesar 75,4% dengan katagori *sedang*.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan Hutan Desa pada tahapan pra-perizinan hingga tahapan pasca perizinan yaitu perencanaan dan pelaksanaan tergolong dalam kategori **sedang** dengan nilai prosentase 71,55%. Artinya rata-rata responden dalam penelitian ini menjawab setuju dengan adanya pengelolaan Hutan Desa di Negeri Morella.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ridwan. 2015. *Pembelajaran Sainifik untuk Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta : Bumi Aksara
- Alsa, Asmadi. 2004. *Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Awang S A. 2010. Hutan Desa: *Realitas Tidak Terbantahkan sebagai Alternatif Model Penglelolaan Hutan di Indoensia*. Makalah. <http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/>. Di muat 1 Juni.
- Birgantoro, B. A., & Nurrochmat, D. R. 2007. *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara Forest Resource Utilization by People in KPH Banyuwangi Utara Metode Penelitian*. XIII(3), 172-181.

- [CIFOR] Center for International Forestry Research. 2002. Hutan Adat. Bogor, Indonesia: Warta Kebijakan No 3 Februari 2002
- Damayanti, P.T. 2011. *Upaya pelestarian hutan melalui pengelolaan sumberdaya hutan Bersama masyarakat*. 3(1), 70-82.
- Desmita, 2009. *Persepsi Merupakan Salah Satu Aspek Kognitif Manusia*. (Online) [http://www.id.shvoog.com/pengertian dan faktor-yang-mempengaruhi persepsi.com](http://www.id.shvoog.com/pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhi-persepsi.com). (Diakses 20 agustus 2022).
- Ereh, Astri P. 2022. Partisipasi Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Erie Kecamatan Nusaniwe. Universitas Pattimura
- Gibson. 1986, *Persepsi Adalah Kognisi Pengetahuan Yang Mencakup Penapsiran Objek* (Online) [http://www.id.com/pengertian persepsi masyarakat.com](http://www.id.com/pengertian-persepsi-masyarakat.com)
- Hardjosoemantri, 1985. *Masyarakat Sekitar Hutan Adalah Masyarakat Yang Tinggal Disekitar Hutan*. (Online) [http://www.id.com/pengertian masyarakat.com](http://www.id.com/pengertian-masyarakat.com). (Diakses 20 agustus 2022)
- Kartono dan Gulo, 1987. *Persepsi Adalah Pengetahuan Lingkungan Yang Diperoleh Melalui Data Indera* (Online) [http://www.id.com/pengertian dan faktor-yang-mempengaruhi persepsi.com](http://www.id.com/pengertian-dan-faktor-yang-mempengaruhi-persepsi.com).
- Khaeruddin. 2018. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Moeliono M, Mulyana A, Adnan H, Yuliani EL, Manalu P, Balang. 2015. *Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban?*. Brief 52. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Regional Program
- Prasetyo, B. A. 2015. *Serba Serbi Hutan Desa*. <http://bp2sdm.dephut.go.id/emagazine/index.php/teknis/1-serbaserbi-hutan-desa.html>. (Diakses 5 september 2022)
- Rakhmat, Jalaludin, 1993. *Psikologi Komunikasi*. Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ridwan, 2015. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabet. Bandung
- Robbins, Stephen P, 1996, *Perilaku Organisasi* Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Soerangadjiwo. 1991. Perencanaan Pengusahaan Hutan. Duta Rimba 30(XVII): 48-52
- Soehartono, 1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Saptroni, 1989. *Persepsi Adalah Sebuah Proses Mental Yang Sulit*. (Online) <http://www.digilib.unsac.id/pengguna.php?mn=detail&d10=2213.pdf>. (Diakses 5 september 2022)
- Suparman, A. 1990. *Statistik Sosial*. Rajawali Press. Jakarta

- Supratman, Sahide M A K. 2013. *Hutan Desa dan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Bantaeng*. Jakarta: Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Kerjasama Kementerian Kehutanan, dan Kemitraan
- Syaid, M.N. 2019. *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*
- Triwik. S. Mulati. 2017. Hubungan Kecerdasan Emosional dan Umur Mahasiswi Semester I DIV Kebidanan Tahun 2017. *Jurnal kebidanan dan Kesehatan Tradisional*. Volume 2, No.1. Hal. 1-59.
- Udai Pareek, *Perilaku Organisasi*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1996.
- Wisadirana, 2004, *Masyarakat Merupakan Hasil Dari Suatu Periode Perubahan Budaya Dan Akumulasi Budaya* (Online) [http://www.id.com/pengertian masyarakat](http://www.id.com/pengertian_masyarakat). (Diakses tanggal 7 oktober 2022).